BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap)

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa definisi Standar Akuntansi Pemerintah menurut para ahli, Menurut Indra Bastian (2010:138), menyatakan bahwa definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia".

Sedangkan menurut Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

> "Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Hal senada dinyatakan oleh Baldric Siregar (2015:72) menyatakan definisi Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah".

Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dala menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

2.1.1.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Baldric Siregar (2015:94) dan PP No 71 Tahun 2010 indikator Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No 07 Tentang Aset Tetap) meliputi :

1) Berwujud
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3) Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Adapun penjelasan indikator Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap) menurut Baldric Siregar (2015:105) dan PP No 71 Tahnun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Berwujud

   Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan

tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

   Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal

   Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

   Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah..Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

   Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi

2.1.2 Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Turban, *et.al* (2005:19), menyatakan bahwa definisi Teknologi Informasi adalah:

"Aspek teknologi dari Sistem Informasi, meliputi *hardware,software, database*, jaringan *(network)*".

Sedangkan menurut Y. Maryono dan B. Patmi Istiana (2007:3), menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah:

> "Teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pengertian Teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta

> mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi".

Menurut Edy Irwansyah dan Jurike V. Moniaga (2014:V) menyatakan bahwa:

> "Teknologi Informasi atau Information technology adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi tersedia yang tujuan membantu manusia untuk menjalani hidup dengan lebih mudah dan lebih baik dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Di sini teknologi komunikasi digunakan sebagai alat penyaluran informasinya, sedangkan informasinya diolah dan disimpan dalam komputer".

Berdasarkan ketiga definisi di atas, Teknologi Informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan untuk membantu manusia mempermudah dan memperbaiki pengelolaan data yang diolah dan disimpan dalam komputer dengan teknologi komunikasi yang digunakan sebagai alat penyaluran informasinya dengan meliputi aspek *Hardware, Software, database*, jaringan (*Network*).

2.1.2.2. Indikator Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan subsistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. menurut Turban, *et.al* (2005:19), bahwa komponen teknologi informasi terdiri dari:

1) Perangkat keras (*Hardware*)

2) Perangkat lunak (*Software*)

3) Basis data (*Database*)

4) Jaringan Komunikasi (*Network*)

Adapun Penjelasan Indikator Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras *(Hardware)*

   Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi (seesar, 2010: 6). Turban, *et al* (2005) mengatakan hardware adalah adalah serangkaian peralatan seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Bersama-sama berbagai peralatan tersebut menerima data informasi, memprosesnya dan menampilkannya. Sementara menurut O'Brian (2005) hardware, meliputi semua peralatan dan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Sumber daya ini tidak terbatas pada mesin seperti komputer atau perlengkapan lainnya, tetapi juga semua media tempat pencatatan data.

2. Perangkat lunak *(Software)*

   Merupakan sekumpulan program yang memungkinkan piranti keras untuk memproses data. Seesar (2010) mengatakan software merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer.

3. Basis Data *(database)*

   Turban, *et al* (2005) mengatakan bahwa database adalah sekumpulan arsip (file), tabel, relasi, dan lain-lainnya yang saling berkaitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan di antaranya. Meliputi pengelolaan data yang efektif agar dapat memberi informasi

bermanfaat bagi para pemakai akhir dalam sebuah organisasi O'Brian (2005).

4. Jaringan Komunikasi

   O'Brian (2005) Sumber daya jaringan, yaitu jaringan telekomunikasi yang terdiri dari komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya yang dihubungkan satu sama lain melalui media komunikasi serta dikendalikan melalui software komunikasi. Sementara Turban (2005) Mengatakan sistem koneksi atau jaringan (dengan kabel atau nirkabel) yang memungkinkan adanya pembagian sumber daya antar komputer yang berbeda".

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina, dkk (2015:19) mengemukakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

> "Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Sedangkan menurut Baldric (2015:12), menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

> "Kualitas laporan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai

> dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut".

Menurut M. Yusuf (2013:1), menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

> "Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca (kini dikenal sebagai "laporan posisi keuangan") daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporanya setelah pelaksanaan anggaran".

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat di katakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kewajiban daerah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang mencangkup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen asset atau segala bentuk kekayaan yang behubungan dengan hak dan kewajiban pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam prngambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Erlina, dkk (2015: 30) indikator Kualitas Laporan Keuangan yaitu:

1) Andal
2) Relevan
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan indikator Kualitas Laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

   a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan.
   b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   c. Netralisasi. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi

laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspentasi mereka di masa lalu.
b. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
c. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencangkup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

   Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan.
4. Dapat Dipahami

   Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia."

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010 : 138) terdapat hubungan terkait antara standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.".

Menurut Mahmudi (2011:271) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan".

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat

disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya M.Ali Fikri Biana Adha Inapty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016), menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suharjo ISSN: 2252-7826 (2013) dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian menurut Susilawati dan Dwi Seftihani Riana ISSN: 1693-4482 (2014), menyatakan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh sekali terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

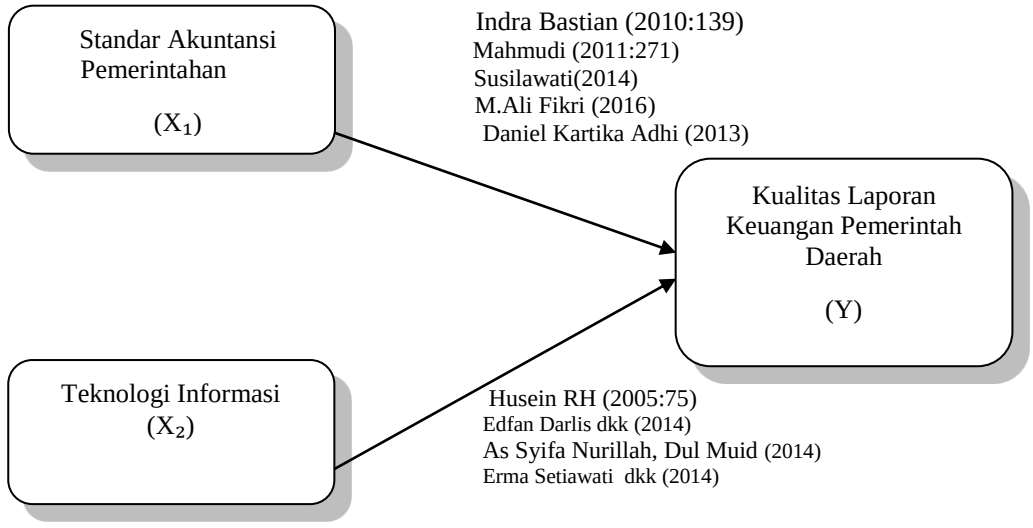
MenurutHusein RH, (2005 :75), mengatakan pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Perkembangan berbagai macam teknologi informasi terutama computer dan internet membuat pergeseran tata cara pelayanan public menjadi system online yang terkomputerisasi. Dalam hal penyusunan pelaporan keuangan organisasi telah memanfaatkan berbagai *software* yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Penggunaan *Software* akuntansi tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas terutama berkaitan dengan akurasi dan kecepatan".

Berdasarkan pemaparan diatas tentang teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi membuat tata cara pelayanan public menjadi system online dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui berbagai *software* yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari (2014), menyatakan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Karmila, Amires Rusli Tanjung dan Edfan Darlis ISSN 1907-364X (2014), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik teknologi informasi dimanfaatkan maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

2.2.3 Bagan Paradigma Pemikiran



Gambar 2.1
Pradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:99) Hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik ".

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka dalam penelitian ini dapat di-rumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H_1: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2: Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.